

## ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI KOTA BANDUNG

Muhammad Anzhal Al Haqi Chaniago<sup>1</sup>, Ririt Iriani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
e-mail: [muhammadanzhal74@gmail.com](mailto:muhammadanzhal74@gmail.com)

### Abstrak

Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal dibarengi dengan kebijakan otonomi daerah sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan keuangan serta melaksanakan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan potensi keuangan daerah akan memiliki sumber keuangan daerah yang cukup besar untuk mengembangkan daerah lebih lanjut. Penelitian ini mempunyai tujuan guna melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal di Kota Bandung tahun 2010-2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu mendeskripsikan kausalitas antar variabel dengan menguji hipotesis data yang ada sesuai dengan kegunaannya. Pada penelitian ini terdapat data time series yaitu tahun 2010-2022 dengan menggunakan data Kota Bandung. Metode statistik deskriptif yang dilakukan dalam analisis penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis, meliputi koefisien determinasi serta uji t, dengan menggunakan *software Eviews 10*. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Sedangkan, dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Kota Bandung

---

### PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah fenomena dengan maksud terdapatnya pelimpahan wewenang dan urusan dari pusat ke daerah, yang berlakukan secara penuh guna mengatur urusan pengeluaran daerah, serta berupa sebagian wewenang dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Perpindahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi memberikan implikasi yang cukup besar terhadap pengelolaan fiskal pada bagian pemerintahan kota/kabupaten, meliputi peningkatan rasio belanja pemerintah daerah terhadap belanja pemerintah pusat dan berlakunya sistem fiskal antar tingkat pemerintah yang terbaru serta kemudian lebih baik (Hofman & Kaiser, 2002).

Disatu sisi desentralisasi fiskal berperan lebih besar bagi pemerintah daerah untuk berwenang dalam sistem pengelolaan daerah, tetapi dilain sisi dapat memicu sebuah persoalan baru, karena berbeda-bedanya tingkat kesiapan fiskal daerah. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi fiskal dibarengi dengan kebijakan otonomi daerah sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan keuangan serta melaksanakan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Ayem & Pratama (2018) otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian yang optimal bagi daerah yang sedang berkembang dan tidak lagi terpusat pada pusat. Tetapi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan kontribusi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah yang sesuai. Pengelolaan potensi keuangan daerah akan memiliki sumber keuangan daerah yang besar untuk mengembangkan daerah lebih lanjut. Dengan demikian, selama pemerintah daerah melakukan sistem otonomi daerah, pengelolaan keuangan secara menyeluruh berada dibawah naungan daerahnya sendiri dan kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya yaitu belanja modal. Bagian alokasi anggaran

belanja modal ini memuat alokasi paling kecil dibandingkan dengan alokasi belanja lainnya. Alokasi anggaran belanja modal didasarkan oleh kebutuhan kelembagaan dan infrastruktur daerah, termasuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pemanfaatan lembaga publik yang tentunya dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai aktivitasnya dalam proses pembangunan ekonomi.

.Sejalan dengan pembangunan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi tentu saja merupakan sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang juga sangat diharapkan dapat tercapai. Menurut Sukirno (2010:9) Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang yang mana dapat menyebabkan meningkatnya barang dan jasa yang disebabkan oleh beragam faktor. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai perbaikan berkelanjutan dalam perekonomian daerah (Fajri & Iriani, 2022). Ketika kegiatan ekonomi warga suatu daerah secara langsung mempengaruhi produksi barang dan jasa, daerah tersebut dapat dinyatakan tumbuh secara ekonomi. Pemerintah dapat membuat rencana untuk pendapatan dan perkembangan masa depan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah, yang diwujudkan dalam akuisisi bangunan, sarana dan prasarana, serta infrastruktur guna kepentingan masyarakat umum. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditangani dengan bantuan Produk Domestik Regional Bruto.

Potensi dana masing-masing daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jika dana yang diperoleh ditingkatkan sebagai sumber belanja daerah, pemerintah daerah juga harus meningkatkan potensi daerahnya sendiri. Selain itu, mengenai pendapatan APBN yang salah satunya mencakup dana alokasi umum yang dianggarkan dengan tujuan sebagai pemerataan alokasi keuangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dengan asumsi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat (Kurniawati & Muzdalifah, 2022).

Kota Bandung termasuk salah satu wilayah yang beradial di Provinsi Jawa Barat. Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kemandirian daerahnya yaitu dengan melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan menyediakan proporsi yang sesuai mengenai alokasi anggaran belanja yang lebih tinggi dalam berbagai sektor, tentunya hal tersebut dapat dinilai produktif untuk proses memajukan daerah. Adapun cara optimalisasi keuangan daerah di Kota Bandung salah satunya yaitu dengan pengelolaan alokasi belanja modal. Pengalokasian belanja modal di Kota Bandung memiliki jumlah yang berbeda-beda pada setiap tahunnya dan terhitung mengalami fluktuatif, beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan alokasi belanja modal ini bisa ditinjau dari meningkatnya sumber daya manusia, pemerataan pembangunan ekonomi, kondisi serta kekayaan alam, dll..

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waskito, Zuhrotun dan Ruserlisyani (2019) melakukan penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwasannya Pertumbuhan ekonomi, PAD dan DBH tidak memiliki pengaruh signifikan sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh. Namun, penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, perlu diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang hanya terfokus kepada 3 variabel saja dengan studi terhadap satu wilayah Kota.

Berdasarkan uraian diatas terdapat rumusan masalah yaitu: Apakah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap belanja modal di Kota Bandung?, Apakah pendapatan asli daerah memiliki

pengaruh terhadap belanja modal di Kota Bandung?, Apakah dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Bandung?

## METODE

Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kuantitatif yaitu mendeskripsikan kausalitas antar variabel dengan menguji hipotesis data yang ada sesuai dengan kegunaannya. Penelitian ini menggunakan data *time series* mencakup tahun 2010-2022 dengan memakai data Kota Bandung. Data penelitian diambil menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh melalui portal data DPJK KEMENKEU dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis ini berguna untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal di Kota Bandung tahun 2010-2022 yang menggunakan beberapa pengujian meliputi uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah model regresi telah memenuhi syarat sehingga menjadi regresi yang sesuai kemudian dapat memperoleh hasil estimasi BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda yang dijalankan menggunakan software *Eviews 10* sebagai alat olah data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### 1. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi linier berganda sebagai alat analisis perlu mensyaratkan adanya uji asumsi klasik antara lain: uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

Uji normalitas untuk melihat model yang mana jika hasil tes normalitas residual tersebut dapat dinyatakan terdistribusi normal bila nilai probabilitas Jarque-Berra  $> 0,05$ . Berdasarkan hasil uji menunjukkan nilai Jarque-Berra sebesar 0,411 artinya data berdistribusi normal.

Uji autokorelasi ditentukan dengan apakah data residual terjadi secara acak atau tidak dengan signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi pada hasil uji  $> 0,05$ , maka persamaan regresi tidak memiliki masalah autokorelasi. Munculnya autokorelasi dikarenakan observasi yang berurutan mempunyai keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan hasil uji di atas yang menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test terlihat bahwa nilai probabilitas Chi-Square(2) sebesar 0,834 yang berarti lebih dari signifikansi 0,05. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa tidak adanya gejala autokorelasi dalam residual.

Uji multikolinearitas menentukan apakah ada korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui adanya tidaknya gejala dalam model dapat diketahui dengan *Variance Inflation Factor (VIF)* dengan nilai korelasi  $< 10$ . Berdasarkan hasil uji tersebut menunjukkan hasil korelasi setiap variabel  $< 10$  yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi 1,19, variabel PAD 2,05, dan variabel DAU 1,92. Dapat disimpulkan tidak terjadinya gejala multikolinearitas pada data tersebut.

Uji heterokedastisitas untuk mengetahui terjadinya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, menggunakan uji glejser untuk meregresi nilai residual terhadap variabel independen. Berdasarkan hasil uji nilai signifikansi *probabililitas*  $> 0,05$  yaitu 0,5868 yang artinya tidak terjadinya heterokedastisitas pada data tersebut.

#### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU Terhadap Belanja Modal di Kota Bandung Tahun 2010-2022. Dengan menggunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji t (uji parsial).

- a) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variabel independen. Berikut adalah hasilnya:

Gambar 1 Hasil Uji R

Dependent Variable: LOGY Method: Least Squares Date: 06/02/23 Time: 21:13 Sample: 2010 2022 Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.420589	4.287803	-0.098090	0.9240
X1	0.069694	0.032438	2.148559	0.0602
LOGX2	-0.079606	0.267294	-0.297821	0.7726
LOGX3	1.055003	0.230730	4.572466	0.0013
R-squared	0.833551	Mean dependent var		20.78146
Adjusted R-squared	0.778068	S.D. dependent var		0.630572
S.E. of regression	0.297060	Akaike info criterion		0.657896
Sum squared resid	0.794203	Schwarz criterion		0.831726
Log likelihood	-0.276323	Hannan-Quinn criter.		0.622166
F-statistic	15.02354	Durbin-Watson stat		1.762504
Prob(F-statistic)	0.000753			

Sumber: Eviews 10 (data diolah)

Pada hasil uji R menunjukkan hasil koefisien determinasi dilihat pada *Adjusted R-Squared* se besar 0,77 artinya sebesar 77% Belanja Modal dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum di Kota Bandung Tahun 2010-2022. Sedangkan sisanya ( $100\% - 77\% = 23\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

- b) Uji t berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji parsial.

Gambar 2 Hasil Uji t

Dependent Variable: LOGY Method: Least Squares Date: 06/02/23 Time: 21:13 Sample: 2010 2022 Included observations: 13				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.420589	4.287803	-0.098090	0.9240
X1	0.069694	0.032438	2.148559	0.0602
LOGX2	-0.079606	0.267294	-0.297821	0.7726
LOGX3	1.055003	0.230730	4.572466	0.0013
R-squared	0.833551	Mean dependent var		20.78146
Adjusted R-squared	0.778068	S.D. dependent var		0.630572
S.E. of regression	0.297060	Akaike info criterion		0.657896
Sum squared resid	0.794203	Schwarz criterion		0.831726
Log likelihood	-0.276323	Hannan-Quinn criter.		0.622166
F-statistic	15.02354	Durbin-Watson stat		1.762504
Prob(F-statistic)	0.000753			

Sumber: Eviews 10 (data diolah)

Dari uji t yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a) Pada variabel  $X_1$  terhadap  $Y$  diketahui  $t$  hitung  $< t$  tabel yaitu  $2,14855 < 2,26215$  dengan nilai signifikan  $0,06 > 0,05$ . Artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung.
- b) Pada variabel  $X_2$  terhadap  $Y$  diketahui  $t$  hitung  $< t$  tabel yaitu  $-0,29782 < 2,26215$  dengan nilai signifikan  $0,77 > 0,05$ . Artinya  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung.
- c) Pada variabel  $X_3$  terhadap  $Y$  diketahui  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $4,57246 > 2,26215$  dengan nilai signifikan  $0,00 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak,  $H_1$  diterima, secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Bandung Tahun 2010-2022 dengan dilihat dari uji  $t$  diatas yang mana tingkat signifikan  $> 0,05$ . Dengan demikian jika dilihat dari peran pemerintah dalam menangani pertumbuhan ekonomi masih kurang efektif dilaksanakan. Kemudian jika melihat perkembangan Pertumbuhan Ekonomi melalui data dari tahun 2010-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif disetiap tahunnya, namun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sampai 2020. Hasil dari analisis sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukirno (2010:9) bahwasanya, pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang dimana dapat meningkatnya barang dan jasa yang disebabkan oleh berbagai faktor. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan kegiatan dalam perekonomian yang bertujuan untuk mendorong barang dan jasa guna diproduksi kepada masyarakat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh PDRB, yang mana jika penyebaran PDRB tidak merata maka akan menyebabkan kesenjangan dalam pengalokasian distribusi pendapatan dan akan sangat berdampak kepada daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian Siti Mundiroh (2019) serta Fathia dan Rusdi (2020) menyatakan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Sesuai hasil analisis yang dilakukan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kota Bandung dilihat dari hasil uji  $t$  yang mana signifikannya  $0,77 > 0,05$  dengan koefisien regresi sebesar  $-0,0796$ . Hal ini dapat dilihat pengalokasian pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Bandung bisa terbilang cukup besar. Pengalokasian yang tepat bisa menunjang pelayanan masyarakat daerah, contoh pelayanan masyarakat yang dimaksud seperti peningkatan sarana infrastruktur yang ada di Kota Bandung memang secara rata-rata terbilang mengalami perkembangan secara terus menerus dari segi tata wilayah kota, lingkungan hidup serta fasilitas lainnya yang mendukung kenyamanan masyarakat. Akan tetapi pemerintah Kota Bandung belum mampu mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan daerah melalui anggaran belanja modal guna meningkatkan pelayanan masyarakat secara keseluruhan serta efisien. Sejalan dengan konsep yang diterangkan oleh (Mardiasmo, 2021) bahwa masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Hal tersebut pun pada akhirnya menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya hubungan antara PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Dengan anggapan keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi. Penelitian ini juga didukung penelitian Waskito, Zuhrotun dan Ruserlisyani (2019) serta Alpi dan Sirait, (2022) membuktikan

tidak adanya pengaruh signifikan PAD terhadap Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Selanjutnya, dari analisis yang telah dilakukan DAU memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal di Kota Bandung tahun 2010 - 2022 dengan dilihat dari hasil uji t yang mana tingkat signifikansi  $< 0,05$  yaitu sebesar 0,00. Dapat dikatakan dana alokasi umum mempengaruhi belanja modal dalam pengalokasiannya yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Bandung, karena sumber dana alokasi umum di Kota Bandung terbilang cukup besar untuk mengatur belanja daerah khususnya belanja modal. Tentunya pengalokasian anggaran belanja tersebut ditunjukkan kepada kegiatan investasi pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana sebagai penunjang kenyamanan masyarakat serta masa depan daerahnya. Menurut Solikin (2010) dana alokasi umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, terjadi transfer yang sesuai dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk nantinya dimanfaatkan dalam alokasi belanja modal. Penelitian ini didukung oleh penelitian Priambudi (2017), Sari (2018) serta Sudrajat dan Purniawati (2018) menerangkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

### **PENUTUP**

Berdasarkan dengan hasil analisis yang sudah dilaksanakan diatas, dapat ditemukan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Yang artinya, bahwa setiap kenaikan persentase pertumbuhan ekonomi dan angka pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Yang artinya, bahwa setiap kenaikan angka dana alokasi umum akan berdampak terhadap alokasi belanja modal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–13.
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Fajri, A. A., & Iriani, R. (2022). Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali Tahun 2002-2021. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 53–66. <https://doi.org/10.32938/jep.v7i2.2555>
- Fathia & Rusdi. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 379–396. <http://arxiv.org/abs/1011.1669v0> <http://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Hofman, B., & Kaiser, K. (2002). *The Making of The "Big Bang" and its aftermath: a political economy perspective. World Bank Regional Public Expenditure Review*.

- Kurniawati & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(8.5.2017), 2003–2005.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Mardiasmo (ed.); 2021st ed.). Andi ( Anggota IiKAPi ).
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 104. <https://doi.org/10.32493/jabii.v2i1.y2019.p104-122>
- Priambudii, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, VI(1), 136–147.
- Sarii, I. N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Pad Dan Dana Alokasi Umum. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(12), 1–19.
- Solikin, B. R. (2010). *Penggunaan Balance Scorecard Sebagai Dasar Untuk Mengevaluasi Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik*. (Doctoral disertation, Universitas Airlangga).
- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2018). Analisis Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 56. <https://doi.org/10.25273/inventory.v1i1.2284>
- Sukiarno, S. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyanii, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>